

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Reformasi yang terjadi di Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan baik pada sistem pemerintahan. Masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis menurut Mardiasmo dalam Indah (2009) otonomi daerah diharapkan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap terhadap daerahnya masing-masing.

Pemerintah Pusat memberikan otonomi kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah

diharapkan untuk mewujudkan suatu kemandirian, efektifitas dan efisiensi di masing-masing pemerintah daerah. Tujuannya agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, selain itu mendorong pemerintah daerah untuk mampu menggali potensi daerahnya khususnya sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menciptakan persaingan pemerintah daerah yang sehat.

Menurut Harianto dan Adi (2007), dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor potensial untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Dalam rangka usaha untuk penambahan PAD maka secara tidak langsung pemerintah daerah memberikan motivasi untuk menggali potensi alam yang dimiliki di masing-masing daerah.

Saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten/kota di Indonesia. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerahnya. Hal ini merupakan fenomena umum yang terjadi disemua negara terlepas dari sistem pemerintahannya yaitu hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Haryo dalam Senja, 2008).

Dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat (Mutiarra dalam Senja, 2008). Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia menemukan beberapa kasus bahwa PAD hanya mampu

membayai belanja pemerintah daerah paling tinggi 20 persen. Kondisi tersebut terjadi pada era sebelum maupun sesudah otonomi daerah dan terus berkembang (Haryo dalam Senja, 2008).

Didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Menurut Saragih dalam Darwanto dan Yulia (2007), pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misal untuk program-program layanan publik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo dalam Priyo, 2007).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL DI INDONESIA (Survei pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Tengah)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Ada 5 perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama adalah penulis menambah tiga variabel akuntansi yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Peneliti menggunakan 3 variabel tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2008). Perbedaan kedua adalah penulis menggunakan sampel Indonesia Bagian Barat yang diwakili oleh Pemerintahan Daerah di Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Tengah yang diwakili oleh Pemerintahan Daerah di Pulau Kalimantan. Perbedaan ketiga adalah menggunakan *lag* 1 tahun pada variabel Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi. Perbedaan keempat adalah penulis menggunakan data *cross section* yaitu pada tahun 2006 dan 2007. Perbedaan kelima adalah penulis menghilangkan variabel independen yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum (DAU).

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat yaitu Pulau Jawa dan di Indonesia Bagian Tengah yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Selatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah?
2. Apakah rasio efektifitas tahun lalu berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah?
3. Apakah rasio efisiensi tahun lalu berpengaruh negatif terhadap PAD tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah?
4. Apakah PAD tahun berjalan berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah?
5. Apakah rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah?
6. Apakah rasio efektifitas tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah?

7. Apakah rasio efisiensi tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah?
8. Apakah ada perbedaan pengaruh rasio kemandirian tahun lalu, rasio efektifitas tahun lalu dan rasio efisiensi tahun lalu terhadap PAD tahun berjalan antara Indonesia Bagian Barat dan Tengah?
9. Apakah ada perbedaan pengaruh rasio kemandirian tahun lalu, rasio efektifitas tahun lalu dan rasio efisiensi tahun lalu, dan PAD tahun berjalan terhadap belanja modal tahun berjalan antara Indonesia Bagian Barat dan Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Rasio kemandirian tahun lalu yang berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah.
2. Rasio efektifitas tahun lalu yang berpengaruh positif terhadap tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah.
3. Rasio efisiensi tahun lalu yang berpengaruh negatif terhadap PAD tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah.

4. PAD tahun berjalan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah.
5. Rasio kemandirian tahun lalu yang berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah.
6. Rasio efektifitas tahun lalu yang berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah.
7. Rasio efisiensi tahun lalu yang berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah.
8. Perbedaan pengaruh rasio kemandirian tahun lalu, rasio efektifitas tahun lalu dan rasio efisiensi tahun lalu terhadap PAD tahun berjalan antara Indonesia Bagian Barat dan Tengah.
9. Perbedaan pengaruh rasio kemandirian tahun lalu, rasio efektifitas tahun lalu dan rasio efisiensi tahun lalu, dan PAD tahun berjalan terhadap belanja modal tahun berjalan antara Indonesia Bagian Barat dan Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi literatur untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Memberikan kontribusi teori sebagai referensi dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah yang diharapkan berguna bagi pembaca.

2. Praktik

Memberikan kontribusi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan dan menentukan berbagai kebijakan yang akan diambil dalam perencanaan penerimaan PAD dan pengalokasian anggaran belanja modal.